

Urgensi Konseling Krisis Pada Masyarakat Indonesia

Oleh: Najlatun Naqiyah

Universitas Negeri Surabaya

Email : najlatunnaqiyah@unesa.ac.id

Latar Belakang

Hasil diskusi ringan penulis dengan salah satu dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada pertemuan kolegial bimbingan konseling (BK) se Indonesia di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2016, mengungkapkan bahwa dinamika BK di UAD akan mengarah pada konsentrasi bimbingan konseling yang lebih luas: yaitu, mempersiapkan calon konselor di sekolah dan di berbagai seting; penanganan konseling pasca bencana; konseling adiksi; konseling KDRT dengan kerjasama BKKBN; konseling anak pasca trauma; dan konseling kekerasan sosial yang lain. Perluasan ini tepat karena akan memperluas kompetensi calon konselor. Menurut hemat penulis, pengembangan ini menandai awal kemajuan yang signifikan tidak saja bagi kampus ini, tetapi bagi perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia secara luas. Penulis yakin, Bimbingan dan Konseling di UAD akan terus mengalami perkembangan pesat, begitu juga di Indonesia.

Calon konselor tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi konselor dalam seting sekolah saja, tapi jurusan Bimbingan dan Konseling perlu mempersiapkan konselor yang mampu bekerja di berbagai seting kehidupan. Untuk itu, hasil kesepakatan saat merumuskan penyusunan kurikulum BK se Indonesia berisi perlunya kurikulum inti pada jenjang S1, S2 dan S3. Pada jenjang S2 BK diwajibkan menempuh bidang studi teori konseling dan praktikum bimbingan dan konseling. Ini senada dengan usulan Elizabeth M. Vera dan Suzette L. Speight (2003) bahwa konseling berfungsi sebagai layanan responsif yang bersifat segera untuk menangani masalah individual, kelompok, maupun ruang sosial yang lebih besar.

Perbincangan kita kali ini mengangkat topik “Urgensi Konseling Krisis pada Masyarakat Indonesia” sebagai bentuk alternatif lain di samping konseling dalam seting sekolah. Untuk memasuki pembahasan mengenai mendesaknya konseling krisis di Indonesia saat ini, marilah kita cermati sejumlah pertanyaan dan kegelisahan berikut ini. Apakah anak-anak mengalami situasi yang gawat dalam perkembangan psikologisnya? Apakah kekerasan terhadap anak-anak meningkat? Apakah kekerasan yang sama menimpa keluarga? Apakah angka perceraian makin tinggi setiap hari? Apakah anak-anak yang mengalami kecanduan minuman keras dan obat-obatan narkotika meningkat setiap hari? Apakah kerusakan moral

dan karakter di Indonesia meningkat? Apakah kekerasan terjadi di sekolah dan juga di masyarakat? Apakah jumlah penderita HIV/Aids semakin bertambah seiring berjalannya waktu? Apakah kekhawatiran orang tua terhadap keamanan anak makin tinggi? Apakah banyak orang tua yang sibuk bekerja dan mengabaikan perkembangan anak? Jika jawaban dari kesepuluh pertanyaan di atas lebih banyak memilih “ya”, maka sudah saatnya bangsa Indonesia menyadari betapa mendesaknya kebutuhan konseling krisis di Indonesia.

Urgensi Konseling Krisis

Dunia saat ini mengarah ke globalisasi. Setiap hari anak-anak tidak bisa lepas dari *hand-phone* yang berjejaring dengan internet. Kawan sejati mereka adalah internet tersebut. Mereka mengakses internet sebagai aktivitas harian. Saat ini ditandai tumbuhnya “anak-anak digital”. Trend game *pokemon go*, misalnya, berkembang pesat dan diminati banyak orang. Awalnya anak-anak dan remaja ingin mencoba-coba sampai akhirnya ia kecanduan, baik *game online*, ataupun media sosial. Kesehariannya hanya sibuk dengan bermain game, melihat *Instagram*, *update status facebook* dan membaca *whatsapp*. Fenomena ini menjadikan anak digital menjadi terasing dari dunia nyata. Mereka kurang bergaul dan anti sosial (Rob Cover, 2004). Mereka hanya hidup dalam komunitas digital saja. Pada gilirannya mereka tidak bisa hidup normal. Dengan aplikasi *game* kekerasan berada di tangan, mereka menjadi pelaku kekerasan dalam imajinasi. Jenis game yang dimainkan berpengaruh pada perilaku seseorang (Gentile et al., 2011).

Sementara itu di dunia nyata, mereka memiliki masalah yang berkembang dari hari ke hari. Kekerasan makin mengintai di tengah lingkungan mereka sendiri. Sekolah sebagai tempat belajar memunculkan kekerasan verbal dan non verbal. Perilaku *bullying* dilakukan oleh siswa ke siswa. Perilaku ini membuat mereka tumbuh dalam lingkungan yang memicu perilaku kekerasan semakin berkembang. Selain itu, jika relasi antara guru dan kepala sekolah tidak harmonis maka muncul kekerasan struktural. Dampak kekerasan struktural seperti ini terjadi dalam relasi antara murid, guru dan pimpinan. Dampaknya, atmosfer sekolah tampak tidak lagi harmonis. Suasana persekolahan kaku dan tertekan. Lingkungan belajar tidak kondusif. Lingkungan seperti ini memicu siswa tidak bisa berkembang dengan optimal. Ujung-ujungnya, akan melahirkan rasa cemas, depresi dan stres. Siswa tidak betah di sekolah, mereka berperilaku tidak disiplin, sering keluar kelas saat pelajaran, kabur dari sekolah dan prestasi akademik menurun (Shari Kessel Schneider, et al., 2012).

Sementara di sekolah telah tercipta atmosfer yang penuh kekerasan dan tekanan, celakanya, ternyata di lingkungan masyarakat—di luar sekolah—muncul fenomena yang sama. Selain itu, remaja tumbuh di tengah lingkungan yang bebas, individualistik dan tidak peduli satu dengan lainnya. Akibatnya, remaja tumbuh-kembang di lingkungan yang acuh tak acuh, dan mereka belajar dari internet tentang kehidupan yang bebas nilai. Muncullah gaya hidup dengan meniru bangsa asing sebagai pelarian remaja. Orang tua sibuk dengan pekerjaan, sementara anak dibiarkan tumbuh dengan lingkungan yang bebas nilai. Ancaman kekerasan berupa sodomi, pemerkosaan, penganiayaan, *bullying*, gaya hidup LGBTZ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan zina) telah menjadi kekhawatiran bersama. Meningkatnya anak-anak yang terperangkap dalam minum-minuman keras, obat-obatan narkoba serta seks bebas melahirkan ancaman HIV/Aids makin meningkat. Masa-masa remaja saat mencari identitas diri perlu memperoleh perhatian dari orang tua, guru, dan komunitas. Menyediakan lingkungan belajar yang memiliki atmosfer dengan memperhatikan proses pembelajaran yang menumbuhkan karakter akhlak mulia. Contoh kasus, pada tanggal 15 Agustus 2016 muncul berita di koran Jawa Pos tentang kasus seorang siswa SMK menusuk seorang satpam, gara-gara ditegur satpam agar tidak *membleyer* sepeda motor. Akibatnya, kini si satpam dirawat di rumah sakit. Ini tindakan kriminal oleh siswa sekolah. Begitu mudahnya seorang siswa menusuk seseorang hanya karena tidak mampu mengendalikan diri. Emosi yang meluap mengakibatkan perilaku kekerasan (Jawa Pos, 15 Agustus 2016).

Berangkat dari pembacaan fenomena di atas, maka Indonesia sangat memerlukan konseling krisis. Konseling untuk menangani masalah anak yang mengalami tekanan. Anak yang tidak mampu mengatasi problema dan butuh bantuan pihak ahli konselor untuk mendampingi menemukan jalan keluar bagi diri mereka karena korban kekerasan membutuhkan pendampingan konselor tentang psikologis yang dialami, konseling krisis, dan penanganan hukum. Konseling krisis menurut Rex (2008) ialah dukungan yang diberikan untuk menghadapi situasi darurat. Konseling biasanya diberikan dalam jangka pendek dan bersifat sementara serta bila perlu menggunakan sumber rujukan yang tepat.

Model Konseling Krisis Pendekatan Kelompok Multi-budaya

Model konseling kelompok dalam konteks multi-budaya menurut Corey (2012:10) adalah kelompok sosial perlu memperhatikan lingkungan, saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Dalam kelompok, antara anggota dan pemimpin kelompok saling menjaga pluralisme secara alami. Konseling kelompok multi-budaya memperhatikan keragaman

budaya, etnis, suku, ras, gender, kelas sosial, bahasa, agama, identitas seksual dan usia, serta kemampuan dan keterbatasan.

Ada dua tugas yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan konseling kelompok, (1) mengaplikasikan dan memodifikasi teknik konseling kelompok sesuai dengan kepercayaan pada suatu budaya dan perilaku. (2) Mengembangkan teori dan praktek ke dalam kelompok kerja yang secara penuh bisa digunakan dalam keragaman anggota untuk memfasilitasi perubahan dan kemajuan anggota. Menurut Comaz-diaz (2011)—sebagaimana dikutip Corey (2012:11)—menyatakan bahwa keefektifan konseling dan psikoterapi dapat diperoleh dengan mengenal hal-hal yang berperan secara krusial dalam masyarakat: rasa hormat (*awareness*), peduli antara satu dengan yang lain (*respect*), menerima (*acceptance*) dan apresiasi terhadap keragaman budaya (*appreciation of cultural diversity*).

Konseling kelompok multi-budaya harus memperhatikan keragaman budaya dan perilaku budaya. Misalnya faktor suku dan domisili, antara budaya Jawa dan non-Jawa. Selain itu, juga bisa berkembang pada perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual dan usia. Variabel multi-budaya perlu memperhatikan pengalaman kesuksesan dan kegagalan, contoh trauma yang dialami seorang individu dan bagaimana memaknai pengalaman hidupnya. Apakah itu pengalaman kecemasan, takut, ataukah stres. Prasangka sosial terhadap pekerjaan tertentu oleh sekelompok individu juga mempengaruhi cara pandang dan perilaku terhadap prasangka. Krisis individu disebabkan tidak hanya faktor perbedaan tempat tinggal, namun juga prasangka negatif, kekerasan verbal dan nonverbal yang menyebabkan seseorang merasa terancam, ingin menghindar, melarikan diri dan ingin bunuh diri. Berikut ini beberapa bentuk model konseling krisis secara kelompok.

1. Model Konseling PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)

Model konseling PPT ini umumnya dikembangkan di rumah sakit daerah dan propinsi. Setiap rumah sakit memiliki satu ruang, sebagai pusat pelayanan terpadu yang tugasnya menangani pengaduan dan melakukan visum bagi korban yang mengalami kekerasan. PPT dilakukan oleh beberapa ahli yang tergabung dalam koordinasi BKKBN dan rumah sakit serta kepolisian. Alur korban yang masuk pada pusat pelayanan terpadu dimulai dari, (1) Korban melapor ke PPT di rumah sakit daerah, (2) Korban ditangani oleh konselor jaga, (3) Korban memperoleh bantuan visum dari dokter di rumah sakit, (4) Korban memperoleh layanan konseling krisis, (5) Korban memperoleh layanan bantuan hukum, (6) Korban memperoleh pendampingan saat proses hukum.

Hambatan dalam PPT adalah banyaknya kekerasan yang tersembunyi. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena hambatan budaya, dimana kekerasan

KDRT dianggap wajar oleh masyarakat. Banyak kasus dari KDRT yang tidak dilanjutkan ke proses hukum. Selain itu, menikah usia dini atau kawin paksa pada anak semakin meningkat dan tidak masuk dalam ranah hukum. Ketidakadilan dalam masyarakat juga terjadi pada korban perkosaan. Contoh, jika terjadi perkosaan, maka si korban akan menjadi korban sosial. Korban perkosaan dianggap membawa aib keluarga, sehingga membuat malu keluarga. Maka jarang sekali melaporkan kasus perkosaan dan inses ke kepolisian, karena dianggap sebagai aib. Problem lain adalah tidak adanya pendampingan hukum atas korban kekerasan yang mengajukan kasusnya ke pengadilan.

2. Model PUAN (Pondok untuk Anak dan Perempuan) Amal Hayati

Model penanganan korban di pondok pesantren dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, meliputi bupati, direktur rumah sakit daerah, kepala pengadilan agama, Kapolres, LSM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pengadilan umum dan pengasuh pondok pesantren. Ketujuh lembaga ini bekerjasama dalam menangani korban kekerasan yang datang ke pondok pesantren untuk memperoleh perlindungan. Layanan rumah aman di pondok pesantren membantu korban untuk menenangkan diri dari tekanan keluarga yang mengalami KDRT, pemulihan psikologis korban perkosaan, dan penitipan anak yang lahir tidak diinginkan.

Selama ini jamak didapati, masyarakat desa lebih mempercayai kiai/nyai untuk melakukan konsultasi. Kiai/nyai kadang berperan mendamaikan pertikaian antara pasangan suami istri. Terkait dengan PUAN, bagi istri yang memperoleh kekerasan dalam rumah tangga, misalnya pertikaian, pemukulan, dan penyiksaan, mereka melaporkan kasusnya ke PUAN, dan tinggal sementara di pondok pesantren. Kiai dan bu nyai menjadi mediator untuk mendamaikan pasangan yang bertikai. Selama korban KDRT tinggal di pondok, segala kebutuhan hidup seperti makan dan minum serta peralatan tidur disediakan secara gratis oleh pesantren. Layanan konseling di PUAN bersifat gratis untuk membantu umat. Semua biaya difasilitasi oleh pondok pesantren dan kerjasama pesantren dengan pemerintah daerah.

Pelayanan konseling di PUAN menggunakan pendekatan konseling Islami, yaitu pendekatan dengan memasukkan nilai-nilai Islam untuk melakukan perdamaian dalam keluarga yang bertikai. Misalnya, ketika PUAN menyelesaikan permasalahan selingkuh oleh pasangan yang akan menggugat cerai, maka pendekatan yang dilakukan dengan konseling islami sebagai berikut. Istri yang mengadu ke pesantren diterima dan diberikan tempat aman. Konselor melatih istri untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dengan sholat dan mengaji al-Qur'an selama di pondok. Menambah keyakinan bahwa

tujuan pernikahan semata-mata mencari kerelaan Allah SWT. Istri diajarkan untuk melupakan pengalaman pahit dan memberi maaf. Nilai-nilai kesabaran dan mengalah untuk berkorban lebih ditekankan demi kepentingan anak. Sementara suami yang selingkuh diberi nasehat oleh kiai agar bertaubat dan meminta maaf kepada istri serta tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mereka diingatkan bahwa perzinaan dalam Islam masuk kategori dosa besar. Dengan demikian, perceraian dapat dihindari oleh pasangan tersebut apabila mereka mau mendengar nasihat perkawinan dari kiai/bu nyai.

3. Model Konseling Komunitas

Konseling komunitas menurut Lewis, Daniel & Deandrea (2003) ialah konseling yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memecahkan masalah dengan memperhatikan latar belakang budaya, ras, jenis kelamin, etnis, bahasa, kelas sosial, letak geografis dan pengalaman traumatik konseli. Model konseling komunitas adalah memperhatikan aspek multi-budaya. Dalam konseling komunitas perlu memahami pengalaman yang membuat konseli tertekan, takut, cemas dan stres. Pengalaman tersebut bisa juga diakibatkan oleh tekanan budaya setempat, seperti stigma yang membuat konseli ketakutan dan tidak berdaya.

Selain itu urgensi konseling krisis juga berlaku bagi anak-anak korban KDRT, dimana hal tersebut berdampak pada gangguan emosi, seperti sedih dan cemas serta depresi. Kondisi ini perlu segera memperoleh konseling. Satu hal yang perlu kita perhatikan, perilaku anak KDRT di sekolah seringkali mengalami gangguan konsentrasi belajar, sering bolos sekolah, dan tidak disiplin. Misalnya anak yang menyaksikan kekerasan yang dialami ibunya di rumah, akan mengalami rasa sedih dan tertekan. Akibatnya, perasaan sedih terbawa ke sekolah dan mengganggu konsentrasi belajar. Bagi anak-anak yang mengalami KDRT perlu pendampingan karena cenderung diam dan sedih. Bagaimana caranya? Pendekatan konseling bagi anak KDRT bisa melalui konseling individual. Anak-anak dilatih untuk bisa konsentrasi belajar dalam keadaan sulit. Melakukan relaksasi dan berpikir positif. Anak-anak diajarkan untuk bisa menerima diri apa adanya dan meningkatkan semangat untuk belajar tekun agar cita-cita berhasil di masa depan.

Latihan disiplin bagi anak-anak korban KDRT dilakukan dengan tugas-tugas rumah yang dipantau oleh konselor. Membuat kontrak kerja tentang pendisiplinan belajar, misalnya konselor membuat kontrak dengan anak. Konselor berkolaborasi membuat target capaian bersama yang bisa dijangkau si anak. Anak merasa diperhatikan oleh konselor. Tindak lanjut dari kontrak dapat dikembangkan menjadi jurnal harian, mingguan dan

bulanan tentang aktivitas belajar anak korban KDRT. Konselor memantau dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas anak melalui jurnal aktivitas keseharian anak. Jurnal bertujuan menuliskan kegiatan belajar secara mandiri. Aktivitas yang terangkum dalam jurnal membuat anak memiliki pengalaman sukses. Anak berlatih untuk tepat waktu dan membiasakan tekun membaca dan menulis walau kondisi retak di keluarganya.

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat membutuhkan adanya konseling krisis. Problem-problem sosial yang menimpa keluarga, individu, anak dan remaja, selain menggelisahkan kita sebagai sesama manusia yang masih memiliki hati nurani, juga patut kita renungkan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia membutuhkan konseling. Salah satunya adalah konseling krisis untuk penanganan hal-hal tersebut.

Dari itu, kebutuhan masyarakat akan tenaga konselor sangat besar. Konselor tidak saja berkiprah di sekolah sebagai tenaga BK, tetapi justru masyarakat lah segmen yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga konselor tersebut. Hal ini menjadi peluang dan sekaligus menjadi tantangan buat kita sebagai konselor maupun bagi calon-calon tenaga konselor yang masih di bangku kuliah. Kurikulum yang memadai dan pengajaran yang mampu mengantarkan calon konselor untuk bisa menangkap “peluang dan tantangan” tersebut, merupakan sebuah keharusan. Harapannya, kebutuhan masyarakat akan tenaga konselor bisa segera diwujudkan. Semoga. *Wallahu a'lam bisshowab.*

Rujukan

Corey, Gerald (2012). *Theory and Practice of Group Counseling*, Eighth Edition.

Brooks/Cole. Cengage Learning.

Cover, Rob (2004). “Digital Addiction: The Cultural Production of Online and Video Game Junkies”, *Media International Australia*, Vol. 113, No. 1, 110-123.

Gentile, et al. (2011). “Pathological Video Game Use Among Youths: A 2-year Longitudinal Study”, *Pediatrics*, Vol. 127, No. 2.

Gladding, ST. (2012). *Counseling: A Comprehensive Profession*. Pearson Higher Ed.

Lewis, J.A., Lewis, M.D., Daniels, J.A., & Deandrea, M.J. (2003). *Community Counseling A Multicultural-Social Justice*. USA: Brooks/Cole.

Rex, J. (2008). *The South Carolina Comprehensive Developmental Guidance and Counseling Program Model*. Columbia.

- Schneider, S. Kessel (2012). "Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students", *American Journal of Public Health*, Vol. 102, No. 1, 171-177.
- Vera, Elizabeth M. & Speight, Suzette L. (2003). "Multicultural Competence, Social Justice, and Counseling Psychology: Expanding Our Roles", *The Counseling Psychologist*, Vol. 13, No. 3, 253-272.